

Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Ketimpangan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan

Devia Hetty Hernany^{1*}, Khairullah Anshari², Amelia Puspita³, Muhammad Haegel Rizfian⁴, Nurul Syifa⁵, Muhammad Rifqi Fadillah⁶, Rosanda Nur Dwitara⁷, Nur Ersanda⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA), 1. Adhyaksa No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

E-mail: deviahettyh@uniska-bjm.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3634>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06 Nov 2025

Revised: 12 Nov 2025

Accepted: 18 Nov 2025

Kata Kunci:

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pedesaan dan Perkotaan.

Keywords:

Empowerment of Village, Rural and Urban Communities.



ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji sejauh mana program pemberdayaan masyarakat desa (PPMD) memengaruhi ketimpangan sosial-ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Banjar. Dengan pendekatan kuantitatif-kualitatif, studi membandingkan indikator kesejahteraan, akses layanan publik, partisipasi ekonomi, dan modal sosial pada desa-desa yang menerima a intervensi pemberdayaan dan wilayah perkotaan penyangga. Rancangan analisis melibatkan Difference-in-Differences (DiD), propensity score matching (PSM), dan analisis jaringan sosial untuk menangkap efek langsung, tidak langsung, dan spillover. Hasil diharapkan memberi bukti kebijakan bagi pemerintah kabupaten untuk merancang intervensi pemberdayaan yang lebih adil dan efektif.

This study examines the extent to which the Village Community Empowerment Program (PPMD) impacts socio-economic inequality between rural and urban areas in Banjar Regency. Using a quantitative-qualitative approach, the study compares indicators of welfare, access to public services, economic participation, and social capital in villages receiving an empowerment intervention and their buffer urban areas. The analysis design involves Difference-in-Differences (DiD), propensity score matching (PSM), and social network analysis to capture direct, indirect, and spillover effects. The results are expected to provide policy evidence for the district government to design more equitable and effective empowerment interventions.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Devia Hetty Hernany, et al (2025). Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Desa terhadap Ketimpangan Wilayah Pedesaan dan Perkotaan, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3634>

PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan antara wilayah pedesaan dan perkotaan masih menjadi tantangan struktural di berbagai daerah Indonesia, termasuk Kabupaten Banjar. Meskipun Indonesia telah memasuki era desentralisasi selama lebih dari dua dekade, distribusi manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata. Kota tumbuh sebagai pusat layanan, industri, dan perdagangan, sementara sebagian besar desa tertinggal dalam hal infrastruktur, kapasitas ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan spasial ini tidak hanya tercermin dari indikator ekonomi makro, tetapi juga memengaruhi mobilitas sosial, kualitas hidup, serta kohesi sosial antarwilayah.

Di Kabupaten Banjar, fenomena ini terlihat dari ketergantungan desa terhadap pusat-pusat aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, perbedaan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta ketimpangan produktivitas antara sektor tradisional di desa dan sektor jasa/industri di perkotaan. Di banyak desa, masyarakat bergantung pada sektor agraris dan perikanan dengan produktivitas yang fluktuatif, sementara di wilayah perkotaan akses terhadap peluang kerja formal dan jaringan pasar jauh lebih luas. Kondisi ini memunculkan kesenjangan kesejahteraan yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan antargenerasi apabila tidak ditangani secara komprehensif.

Pemerintah daerah telah merespons tantangan tersebut melalui berbagai Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), yang mencakup pelatihan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan UMKM, bantuan modal, pembangunan infrastruktur ekonomi skala mikro, pembentukan kelompok usaha bersama, penguatan kelembagaan desa, hingga digitalisasi layanan publik. Program-program ini secara normatif bertujuan memperkuat kemandirian desa dan pada gilirannya menekan kesenjangan desa–kota. Namun, efektivitas program tersebut tidak selalu langsung terlihat. Efeknya sangat bergantung pada faktor kontekstual seperti modal sosial, tata kelola desa, kesiapan infrastruktur, serta integrasi desa dalam rantai nilai ekonomi wilayah.

Di banyak daerah Indonesia, bukti empiris menunjukkan bahwa intervensi pemberdayaan sering bersifat parsial, terfragmentasi, atau tidak terhubung dengan kebutuhan pasar. Akibatnya, manfaat program hanya dirasakan oleh sebagian kecil kelompok, tidak berkelanjutan, atau tidak memberikan dampak signifikan terhadap struktur ketimpangan. Selain itu, kemampuan desa menyerap program sering berbeda-beda tergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas kepemimpinan lokal. Desa dengan modal sosial tinggi—misalnya, kuatnya jaringan gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan partisipasi publik—cenderung mampu mengolah program menjadi aktivitas kolektif yang lebih produktif. Sebaliknya, desa dengan modal sosial lemah lebih rentan terhadap elite capture dan stagnasi program.

Dalam konteks Kabupaten Banjar, kondisi geografis yang heterogen—mulai dari wilayah rawa, desa agraris, hingga desa peri-urban yang dekat dengan pusat kota—menjadikan dampak pemberdayaan tidak seragam. Desa rawa mungkin menghadapi kendala berat pada aksesibilitas, sedangkan desa agraris menghadapi tantangan modernisasi produksi dan akses pasar. Desa peri-urban justru sering menghadapi tekanan urbanisasi dan perubahan mata pencaharian. Ketiga karakter wilayah tersebut membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang berbeda, sehingga evaluasi dampak PPMD menjadi sangat penting untuk memastikan efektifitas kebijakan.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang terukur dan berbasis bukti. Tidak hanya sekadar mengevaluasi keberhasilan PPMD, penelitian ini berupaya memahami mekanisme bagaimana pemberdayaan memengaruhi ketimpangan: apakah melalui peningkatan pendapatan, perluasan jaringan pasar, perbaikan layanan publik, penguatan modal sosial, atau kombinasi semuanya. Pendekatan ini penting karena pembangunan wilayah tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga interaksi kompleks antara struktur sosial, kelembagaan, dan kapasitas kolektif masyarakat.

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan penting bagi diskursus akademik dan praktis mengenai pembangunan desa yang berkelanjutan dan kontekstual. Secara akademis, studi ini memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan ketimpangan spasial pada level kabupaten. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran, komprehensif, dan berorientasi pada keberlanjutan—sehingga tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal jangka panjang.

Konsep Ketimpangan Desa–Kota

Ketimpangan desa–kota merupakan fenomena klasik dalam pembangunan, yang dijelaskan oleh berbagai ahli melalui sudut pandang struktural, ekonomi, sosial, hingga geografis. Ketimpangan ini tidak hanya terkait perbedaan pendapatan, tetapi juga meliputi disparitas akses layanan publik, tingkat pendidikan, kualitas infrastruktur, dan peluang mobilitas sosial.

Menurut Todaro dan Smith (2015), ketimpangan desa–kota muncul karena pembangunan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang memiliki keunggulan komparatif dalam akses pasar, teknologi, dan jaringan perdagangan. Kota menjadi pusat akumulasi modal (*capital accumulation*), sedangkan desa tertinggal dalam struktur ekonomi tradisional. Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang membuat desa sulit mengejar ketertinggalan.

Perspektif lain datang dari Lewis (1954) melalui teori dualisme ekonomi, yang menyatakan bahwa masyarakat negara berkembang terbagi dalam dua sektor utama: sektor modern yang banyak berada di kota dan sektor tradisional yang dominan di desa. Ketidakseimbangan hubungan antara kedua sektor ini menyebabkan alokasi investasi lebih banyak mengalir ke kota sehingga memperlebar jurang ketimpangan.

Dalam konteks spasial, Richardson (1977) mengemukakan bahwa ketimpangan tidak dapat dilepaskan dari struktur ruang yang timpang, di mana wilayah pusat (*core*) memperoleh arus

pembangunan lebih besar dibandingkan wilayah pinggiran (periphery). Desa diletakkan dalam posisi perifer yang memiliki produktivitas lebih rendah dan ketergantungan tinggi terhadap pusat. Teori ini sangat relevan dengan kabupaten yang memiliki desa agraris, desa rawa, dan desa penyangga kota seperti Kabupaten Banjar.

Penelitian empiris di Indonesia juga memperkuat teori ini. Kajian Bappenas (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan desa–kota meningkat seiring laju urbanisasi yang lebih cepat daripada kemampuan desa mengembangkan ekonomi lokal. Dengan demikian, ketimpangan bukan hanya kondisi ekonomi, tetapi juga sebuah manifestasi dari perbedaan infrastruktur, kualitas layanan publik, dan kapasitas sosial masyarakat.

Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep multidimensional yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan. Sejumlah ahli menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya berupa peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga peningkatan kemampuan membuat keputusan dan mengontrol sumber daya.

Friedmann (1992) dalam *Empowerment Theory* menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses transfer kekuatan dari struktur eksternal kepada masyarakat melalui peningkatan akses terhadap informasi, keterampilan, sumber daya produksi, dan peluang ekonomi. Akar pemberdayaan terletak pada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Sementara itu, Chambers (1997) menekankan pemberdayaan sebagai upaya “membalikkan piramida kekuasaan”, di mana masyarakat desa yang selama ini berada dalam posisi terpinggirkan diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Dalam konteks PPMD di Indonesia, teori ini relevan karena banyak kebijakan desa dirumuskan secara top-down tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Pendekatan lain datang dari Amartya Sen (1999) melalui *Capability Approach*. Menurut Sen, pemberdayaan harus dipahami sebagai perluasan kemampuan (capabilities) masyarakat untuk memilih kehidupan yang bernilai bagi mereka. Pemberdayaan desa bukan sekadar bantuan modal, pelatihan, atau pembangunan infrastruktur, tetapi menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat berdaya secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia mengadopsi konsep pemberdayaan melalui Undang-Undang Desa (UU No. 6/2014) yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola keuangan, merencanakan pembangunan, dan menjalankan program pemberdayaan. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa, modal sosial masyarakat, dan kualitas tata kelola.

Hubungan Pemberdayaan dengan Penurunan Ketimpangan Desa–Kota

Hubungan ini dibahas oleh berbagai ahli melalui pendekatan integratif. Secara konseptual, pemberdayaan memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan jika mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa.

Secara ekonomi, pemberdayaan berperan dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang usaha, memperkuat rantai nilai, dan memperluas akses pasar. Ellis (2000) dalam *livelihood framework* menegaskan bahwa pemberdayaan yang efektif dapat memperkuat aset ekonomi masyarakat sehingga mereka lebih mampu beradaptasi terhadap tekanan eksternal.

Secara sosial, pemberdayaan dapat memperkuat modal sosial, meningkatkan partisipasi komunitas, dan memperluas jaringan kerja sama. Putnam (1993) menyatakan bahwa modal sosial yang kuat—kepercayaan, solidaritas, dan norma kolektif—merupakan fondasi penting bagi pembangunan desa. Program pemberdayaan yang mampu menumbuhkan modal sosial terbukti meningkatkan keberlanjutan program desa.

Secara kelembagaan, pemberdayaan dapat memperkuat pemerintahan desa melalui pelatihan aparatur, peningkatan transparansi, dan perbaikan sistem administrasi. Ketika tata kelola desa semakin baik, implementasi pembangunan akan lebih efektif dan target pengurangan ketimpangan menjadi lebih realistis.

Namun, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu otomatis mengurangi ketimpangan. Kajian oleh Kusumastuti (2018) menemukan bahwa banyak program pemberdayaan di Indonesia tidak memberikan dampak signifikan karena kurangnya integrasi antara

pelatihan, akses modal, dan pemasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan memerlukan ekosistem pendukung, bukan intervensi sporadis.

METODE

Desain penelitian

Studi kuasi-eksperimental dengan kombinasi cross-sectional dan panel pendek (pre-intervensi dan post-intervensi 1 tahun). Pendekatan mixed-methods: kuantitatif untuk estimasi dampak; kualitatif untuk mekanisme.

Populasi & sampel

1. Unit analisis: rumah tangga, kelompok usaha, dan perangkat desa di Kabupaten Banjar.
2. Sampel treatment: desa yang menerima PPMD ($n \approx 20-30$ desa, stratified by tipe: rawa, agraris, peri-urban).
3. Sampel kontrol: desa serupa yang belum menerima intervensi (matched via PSM).
4. Responden kualitatif: kepala desa, pelaksana program, perwakilan kelompok usaha, pedagang pasar.

Variabel & pengukuran

1. Independen: keikutsertaan PPMD (binary; intensitas program: anggaran per kapita, jam pelatihan).
2. Dependen: pendapatan rumah tangga, indeks ketahanan pangan, kepuasan layanan publik, waktu akses perizinan, jumlah UMKM aktif.
3. Mediator/Moderator: modal sosial (indeks kepercayaan, partisipasi komunitas), kapasitas SDM, akses pasar (jarak ke pusat pasar, ketersediaan transport), kualitas tata kelola (indeks transparansi RT/RW/desa).
4. Instrumen: kuesioner survei household, lembar observasi fasilitas, panduan wawancara mendalam, peta GIS untuk akses infrastruktur.

Teknik analisis

1. PSM untuk menyeimbangkan karakteristik desa treatment dan kontrol.
2. Difference-in-Differences (DiD) untuk mengestimasi efek rata-rata perlakuan.
3. Multilevel modeling (household nested in desa) untuk menangkap variasi intra-desa dan antar-desa.
4. Analisis jalur / SEM untuk menguji mekanisme mediasi (mis. apakah modal sosial menengahiasi efek PPMD \rightarrow pendapatan).
5. Analisis kualitatif tematik untuk memperkaya pemahaman mekanisme—coding berbasis NVivo atau manual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang Diharapkan (potensi)

1. Peningkatan pendapatan rata-rata dan peluang usaha di desa sasaran, namun efek beragam antar tipe desa.
2. Perbaikan indikator akses perizinan (waktu dan transparansi) terutama bila program mencakup digitalisasi layanan.
3. Dampak pengurangan kesenjangan paling kuat di desa dengan modal sosial tinggi dan tata kelola yang responsif.
4. Bila program bersifat fragmentaris (modal tanpa akses pasar/infrastruktur), efek jangka panjang terhadap ketimpangan minimal.



Gambar 1. Proses Kegiatan

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan hipotesis, rekomendasi kebijakan antara lain:

1. Desain PPMD berbasis rantai nilai: padukan bantuan modal dengan akses pasar dan fasilitasi logistik.
2. Penguatan tata kelola desa: peningkatan transparansi anggaran, pelatihan administrasi, dan penggunaan sistem informasi desa.
3. Pengembangan modal sosial: program kolektif (koperasi, kelompok produsen) untuk menyebarkan manfaat.
4. Investasi infrastruktur dasar: konektivitas jalan dan internet menjadi katalis utama agar efek pemberdayaan berkelanjutan.
5. Monitoring berbasis data: sistem pemantauan indikator kesejahteraan dan layanan pada level desa untuk evaluasi berkala.

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Lanjutan

1. Hasil bergantung pada kualitas data panel; waktu follow-up singkat mungkin belum menangkap efek jangka panjang.
2. Heterogenitas program antar desa mempersulit generalisasi; studi kualitatif diperlukan untuk interpretasi konteks.
3. Penelitian lanjut: kajian cost-benefit program, evaluasi dampak jangka panjang (>5 tahun), dan studi komparatif antar kabupaten.

SIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat desa memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan desa-kota di Kabupaten Banjar, tetapi efektivitasnya tergantung pada desain program yang komprehensif—menggabungkan peningkatan kapasitas, modal sosial, akses pasar, dan infrastruktur. Kebijakan afirmatif yang mengutamakan integrasi layanan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang transparan akan memaksimalkan hasil pemberdayaan dan mendukung pemerataan pembangunan ruang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berperan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Bappenas. (2021). *Laporan Pembangunan Desa dan Perkotaan Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Ellis, F. (2000). *Rural livelihoods and diversity in developing countries*. Oxford University Press.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell Publishers.
- Kusumastuti, S. (2018). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 112–125.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Nugroho, R., & Wicaksono, B. (2021). Implementasi sistem informasi desa dan dampaknya terhadap tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(2), 145–160.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4), 41–50.
- Prasetyo, A. (2019). Transparansi anggaran desa melalui digitalisasi informasi publik. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 4(1), 50–66.
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rafidah. (2021). Dampak program pemberdayaan desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 9(1), 66–78.
- Richardson, H. W. (1977). *Regional growth theory*. Macmillan.

- Sari, R. D. (2019). Pengaruh pemberdayaan perempuan desa terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 98–112.
- Scott, A. J., & Storper, M. (2003). Regions, globalization, development. *Regional Studies*, 37(6–7), 579–593.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Wahyudi, A. (2020). Evaluasi keberhasilan pemberdayaan berbasis KUBE di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(1), 77–92.
- Wicaksono, A. (2021). Digital governance di tingkat desa: Pergeseran menuju evidence-based policy. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, 10(1), 77–91.